

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sumbar di pantai barat pulau Sumatera sangat menguntungkan karena potensi kelautan dan perikananannya sangat besar. Sayangnya, pemberdayaan sektor perikanan belum optimal, sehingga belum menghasilkan produktivitas yang signifikan terhadap perekonomian daerah ini. Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Sumbar tersebar di tujuh daerah kabupaten dan kota a.l. Kota Padang, Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Agam, dan Padang Pariaman.

Kondisi ini sudah diidentifikasi pada penelitian tahun pertama, dimana begitu banyaknya program-program pemerintah yang sudah di lakukan untuk masyarakat di pesisir pantai Sumatera Barat.

Negara kita yang kaya dengan hasil lautnya tetapi tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat nelayan, dimana masih banyak terdapat masyarakat pesisir pantai yang hidup dibawah taraf kemiskinan. Sejak tahun 2004, melalui keputusan Menteri kelautan dan Perikanan No 18 tahun 2004 tentang pedoman umum pemberdayaan ekonomi Masyarakat pesisir (PEMP), pemerintah telah melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai, tetapi belum tergarap secara proporsional. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan masih dilakukan secara tradisional dan kurang didukung dengan teknologi yang tepat guna, sehingga hasil yang didapat tidak begitu maksimal. Hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi mereka tergolong rendah, sehingga masih banyak mereka hidup di garis kemeiskinan

Sebenarnya secara umum program pemerintah mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir(PEMP bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan social ekonomi dengan mendaya gunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan

1.2. Permasalahan

Kurang efektifnya program yang banyak di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan di pesisir pantai, sementara nelayan ini memiliki potensi yang besar untuk di kembangkan. Program yang hanya sifatnya rutinitas dari pemerintah seringkali hanya kondisional dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Oleh sebab itu, potensi perikanan Sumbar yang diperkirakan mencapai 996.439 ton per tahun atau sekitar 20% dari potensi perikanan nasional baru tergarap 18,8% bisa di optimalkan oleh masyarakat di pesisir pantai.

1.3. Tujuan Khusus

Pada umumnya masyarakat miskin, kumuh dan terbelakang tinggal didaerah pesisir pantai. Kondisi ini sangat ironis apabila dibandingkan dengan keadaan alam wilayah pesisir yang kaya akan sumberdaya alam dan potensial dikembangkan secara ekonomi. Menurut Siahaan (Islamy dkk., 2004) di daerah pesisir, umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang sangat kronis. Yaitu kemiskinan yang ditimbulkan akibat adanya tekanan ekonomi dan eksploitasi dari kelompok masyarakat, sehingga nelayan miskin tetap menjadi sangat "marginal". Pesisir pantai Sumatra Barat menyimpan potensi sumberdaya alam yang sangat besar. Dari kegiatan perikanan laut, Potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 18.8% . Berdasarkan fakta itu, peneliti ingin membuat model pemberdayaan ekonomi yang tepat untuk masyarakat pesisir, sehingga mereka terlepas dari kemiskinan .

1.4. Urgensi/Keutamaan Penelitian

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, ada beberapa macam kelompok masyarakat nelayan diantaranya:

- a) Masyarakat nelayan tangkap
- b) Masyarakat nelayan pengumpul
- c) Masyarakat nelayan buruh
- d) Masyarakat nelayan tambak

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Ada yang membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap, ada yang membutuhkan modal kerja dan modal investasi.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.